



Gaji DPRD Kota Juga 'Membengkak'

YOGYA (KR) - Selain DPRD DIY, kenaikan penghasilan bagi anggota DPRD Kota Yogya juga mengalami pembengkakan dari simulasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri. Jika dari simulasi tersebut perkiraan kenaikan hingga 100 persen, kini usai pembahasan anggaran menjadi sekitar 150 persen.

Meski naik cukup signifikan, namun Pemkot Yogya selaku pengguna anggaran menjamin proses pembayarannya tetap lancar. Bahkan per 1 September, gaji baru anggota dewan siap dibayarkan. "Kenaikan penghasilan itu sudah kami siapkan untuk empat bulan. Hak keuangan untuk September juga tidak dirapel pada bulan selanjutnya, tapi langsung dibayarkan," tandas Kepala BPKAD Kota Yogya, Kadri Renggono, Minggu (27/8).

Kesiapan pembayaran gaji baru bagi anggota dewan itu seiring kelengkapan administrasi keuangan. Terutama setelah APBD perubahan 2017 dan peraturan daerah sebagai tindak lanjut PP 18/2017 terkait hak keuangan anggota dan pimpinan dewan disepakati bersama.

Sebelumnya, gaji bagi anggota dewan periode Januari hingga Agustus mencapai Rp 11,1 juta

perbulan. Dari hasil simulasi Kementerian Dalam Negeri sesuai PP 18/2017 naik menjadi Rp 22,9 juta perbulan. Namun simulasi tersebut merupakan perkiraan hitungan terendah. Setelah ada pembahasan, melonjak menjadi sekitar Rp 35 juta perbulan.

Sejumlah unsur penghasilan yang mengontrol kenaikan ialah tunjangan komunikasi intensif dari sebelumnya Rp 4 juta menjadi Rp 14 juta perbulan. Kemudian tunjangan transportasi yang dulu tidak dialokasikan, kini diberikan Rp 7,9 juta perbulan. Di samping itu juga ada tunjangan perumahan Rp 10 juta perbulan. "Masih ada tunjangan reses, tapi tidak diberikan perbulan melainkan tiga kali dalam setahun. Satu kali reses dialokasikan Rp 14 juta bagi tiap anggota dewan. Jika dihitung total dalam sebulan ada tambahan Rp 1 miliar untuk penambahan penghasilan dewan," urai Kadri.

Ketua DPRD Kota Yogya, Sujanarko, menilai kebijakan kenaikan penghasilan tersebut tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Kendati kebijakan itu berlaku di seluruh daerah namun menjadi tantangan bagi lembaga legislatif. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005